

Dampak Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kejahatan Properti (*Property Crime*) di Indonesia.

Hari Satria¹, Doni Satria²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: harysatria3@gmail.com , donisatria@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

1 November 2025

Disetujui:

3 November 2025

Terbit daring:

6 November 2025

DOI: -

Sitasi:

Satria, H. & Doni, S. (2025). Dampak Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kejahatan Properti (*property Crime*) di Indonesia.

Abstract:

This study aims to examine the impact of socio economic factors on property crime in Indonesia. The data used in this research are panel data consisting of observations from 34 provinces in Indonesia over the period 2019 to 2023. Secondary data was obtained from the Central Statistics agency (BPS). The research applies a quantitative method with a descriptive and inductive approach. This study uses panel data regression analysis, with the best model selected being the Fixed Effect Model (FEM). The results of the study indicate that income inequality, education level, and population density have a significant effect on property crime, whereas the unemployment rate does not show a significant effect. Meanwhile, variables of poverty and police strength are also found to have an insignificant influence on property crime in Indonesia

Keywords: *Income inequality, education level, Unemployment, poverty, population density, Police strength*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak faktor sosial ekonomi terhadap kejahatan properti (*Property Crime*) di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data panel yaitu berupa data dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dan induktif. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menemukan bahwa Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan namun, pada variabel Pengangguran tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel Kemiskinan dan Kekuatan Kepolisian berpengaruh tidak signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia.

Kata kunci: Kejahatan Properti, Ketimpangan Pendapatan, Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan, Kekuatan Kepolisian, Kepadatan Penduduk

Kode Klasifikasi JEL: D63, H75, E24, P23

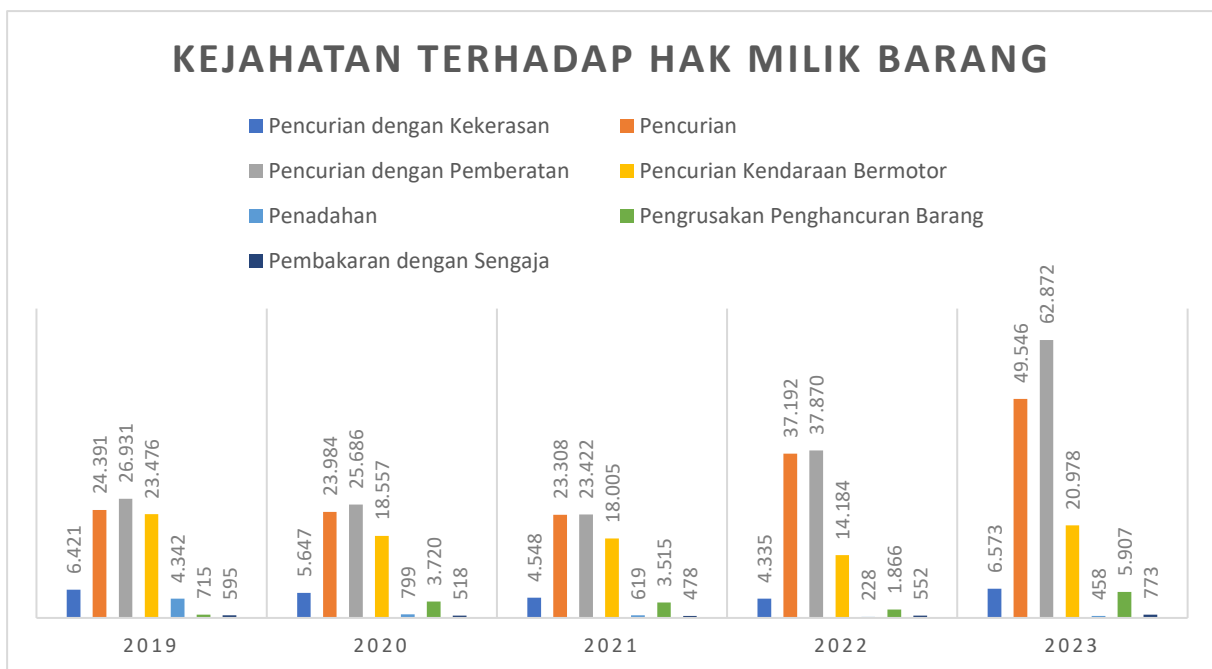
PENDAHULUAN

Tindakan kejahatan atau tindak pidana merupakan perilaku yang melanggar ketentuan hukum, norma sosial, dan nilai-nilai masyarakat, serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus mengancam keselamatan dan nyawa individu (Nurhaz Winda, 2022). Tingkat kriminalitas sesungguhnya dapat lebih tinggi apabila memperhitungkan berbagai kasus kejahatan yang tidak dilaporkan atau luput dari pengawasan aparat penegak hukum (Tamin, 2018). Secara umum, kejahatan muncul sebagai akibat dari sifat dan karakter manusia yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, ketidakseimbangan antara harapan dan pencapaian, serta rendahnya tingkat pendapatan. Kondisi tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan melanggar hukum karena keuntungan yang diperoleh dari kejahatan dianggap lebih besar dibandingkan dengan hasil dari pekerjaan yang sah (Hardianto, 2009).

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat memberikan berbagai dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, arus globalisasi juga membawa pengaruh negatif, terutama melalui masuknya budaya asing yang dengan mudah terserap ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain faktor

tersebut, perbedaan karakteristik sosial dan budaya antar individu maupun antar wilayah turut menjadi salah satu penyebab timbulnya tindak kejahatan properti di Indonesia.

Kejahatan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan menimbulkan konsekuensi serius bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat di suatu wilayah. Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang sering mengganggu stabilitas keamanan dan mengancam kesejahteraan masyarakat adalah kejahatan properti, yang mencakup berbagai jenis tindak kriminal seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, perusakan atau penghancuran barang, serta penadahan (Imran et al., 2018). Jenis kejahatan yang berkaitan dengan harta benda ini merupakan salah satu kasus dengan frekuensi tertinggi setiap tahunnya. Namun demikian, ketersediaan sumber daya untuk menekan angka kejahatan properti masih terbatas, sehingga perlu dilakukan optimalisasi terhadap sumber daya yang ada agar tingkat kejahatan properti dapat diminimalkan secara efektif (Becker, 1974).



Sumber : Badan Pusat Statistik (Statistik Kriminal), 2025

Gambar 1. Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang di Indonesia Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, tindak kejahatan properti di Indonesia pada periode 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi di 5 tahun terakhir. Menurut BPS Statistik Kriminal, kejahatan properti diantaranya adalah pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, penadahan, pembakaran dengan sengaja, pencurian, pencurian kendaraan bermotor, dan pengrusakan penghancuran barang.

Jika dilihat dari Gambar 1, kejahatan properti di Indonesia selama tahun 2019–2023 pencurian dengan pemberatan memiliki tindak kejahatan tertinggi yang patut dihindari, pencurian dengan pemberatan pada 2023 menjadi jenis tindak kejahatan dengan kasus tertinggi bila dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Kejahatan pencurian dengan pemberatan di tahun 2023 mencapai 62.872 kasus.

Pertumbuhan pesat di area perkotaan membawa manfaat ekonomi bagi warganya. Perkembangan yang cepat mendorong migrasi ke kota-kota tersebut sehingga meningkatkan kepadatan penduduk. Tingginya kepadatan berpengaruh pada kualitas hidup, upaya peningkatan kesejahteraan menjadi lebih sulit ketika ruang dan sumber daya terbatas. Untuk mengukur kualitas hidup biasanya dipakai tiga standar utama, yakni kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup, kebutuhan yang bersifat kemanusiaan, serta kebutuhan dasar yang berkaitan dengan pilihan hidup.

Sebagian besar penduduk memilih untuk bermukim di kawasan perkotaan guna memenuhi standar kehidupan yang lebih layak. Akan tetapi, peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berimplikasi pada menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan serta meningkatnya ketimpangan ekonomi antarindividu. Permasalahan ekonomi yang meliputi tingginya tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan antara tenaga kerja yang memiliki pekerjaan dan yang tidak memiliki pekerjaan, serta rendahnya tingkat kerukunan masyarakat, dapat menimbulkan kerentanan sosial yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan tingkat kejahatan di daerah tersebut.

Tindakan kejahatan atau kriminal diyakini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat Kepadatan Penduduk, serta efektivitas aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus kriminal. Perkembangan pesat di kawasan perkotaan umumnya memberikan dampak yang baik pada perekonomian di kalangan masyarakat. Namun, perekonomian yang tinggi di wilayah tersebut juga mendorong terjadinya urbanisasi, di mana masyarakat dari berbagai daerah bermigrasi ke kota dengan harapan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik. Fenomena ini pada akhirnya menimbulkan peningkatan kepadatan penduduk yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi.

Mardiansyah (2020) mengemukakan bahwa dampak ketimpangan distribusi pendapatan pada terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan individu menyebabkan peluang kerja yang diperoleh juga terbatas, sehingga pendapatan yang diterima relatif rendah dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi menjadi sulit. Ketimpangan yang semakin besar tidak hanya memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas di suatu wilayah.

Kualitas pendidikan dapat dikategorikan baik apabila masyarakat mampu mencapai hasil pembelajaran yang optimal dalam rentang waktu yang sama. Ketika kualitas modal manusia meningkat dan berdampak pada produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, maka investasi dalam bidang pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam menekan tingkat kriminalitas. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan yang memadai, serta layanan kesehatan yang berkualitas dapat mendorong individu untuk menempuh cara-cara yang tidak sah demi memenuhi kebutuhan hidupnya Fachrurrozi (2021).

Tekanan ekonomi yang muncul ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki sumber penghasilan dapat meningkatkan kecenderungan untuk mencari alternatif pendapatan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Dengan demikian, penurunan angka pengangguran sering kali diasosiasikan dengan berkurangnya potensi terjadinya kejahatan. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena memiliki pekerjaan atau memperoleh pendapatan secara legal tidak selalu menjamin seseorang terbebas dari perilaku kriminal. Faktor-faktor lain, seperti keserakahan, tekanan

sosial, atau lemahnya moralitas individu, juga dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tetap melakukan tindakan kejahatan meskipun memiliki penghasilan yang sah.

Todaro dan Smith (2005) menjelaskan konsep kemiskinan absolut sebagai suatu keadaan ketika sekelompok individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks ekonomi kejahatan, pelaku kriminal merespons insentif kejahatan berdasarkan pertimbangan rasional atas manfaat dan risiko yang dihadapi. Ketimpangan sosial serta kesenjangan ekonomi di suatu wilayah dapat mendorong individu untuk menempuh jalur kriminal sebagai sarana memperoleh keuntungan material. Dalam kondisi tersebut, pelaku kejahatan sering kali menargetkan korban yang memiliki tingkat kekayaan lebih tinggi, dengan asumsi bahwa hasil dari tindakannya mampu mencukupi bahkan melampaui kebutuhan hidupnya.

Kepadatan penduduk memiliki keterkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup akan menghadapi tantangan yang lebih besar pada wilayah dengan kepadatan penduduknya yang tinggi. Kejahatan properti dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi kejahatan, yang menitik beratkan pada pertimbangan rasional dari pelaku dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kriminal. Dari sudut pandang ekonomi, pelaku kejahatan cenderung lebih memilih beraksi di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Situasi tersebut berpengaruh terhadap beberapa faktor, diantaranya tingginya tingkat pendapatan masyarakat kota yang memberikan potensi keuntungan ekonomi lebih besar dari hasil kejahatan, serta rendahnya probabilitas pelaku tertangkap akibat tingginya tingkat kepadatan penduduk yang dapat mempersulit proses pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam upaya menekan tingkat kejahatan properti, insentif bagi pelaku untuk melakukan tindak kriminal perlu diminimalkan, baik dengan meningkatkan biaya yang harus ditanggung apabila kejahatan dilakukan, maupun dengan menurunkan nilai harapan dari hasil kejahatan melalui peningkatan probabilitas pelaku untuk tertangkap. Oleh karena itu, peran dan kapasitas kepolisian dalam menjaga keamanan serta menegakkan hukum menjadi faktor yang sangat penting. Efektivitas aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan menyelesaikan kasus kejahatan diyakini berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Pelaku kejahatan cenderung mempertimbangkan kekuatan dan kesiapan aparat penegak hukum di suatu wilayah sebelum melakukan aksinya, karena semakin tinggi kapasitas penegakan hukum, semakin kecil peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kejahatan dengan aman.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, kepadatan penduduk, serta kekuatan kepolisian terhadap kejahatan properti di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kejahatan properti, peneliti terdorong untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai fenomena kejahatan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Dampak Faktor Sosial Ekonomi terhadap Kejahatan Properti (*Property Crime*) di Indonesia.”

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahapan pemilihan model terbaik, pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F, serta penghitungan koefisien determinasi R^2 untuk menilai sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak EViews 13. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi serta mengukur

sejauh mana variabel-variabel independen memengaruhi variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas ketimpangan pendapatan (X1), tingkat pendidikan (X2), tingkat pengangguran (X3), tingkat kemiskinan (X4), kepadatan penduduk (X5), dan kekuatan kepolisian (X6), sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kejahatan properti (Y). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan regresi data panel dengan bentuk umum persamaan sebagai berikut:

$$PC_{it} = a + \beta_1 GR_{it} + \beta_2 TP_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 KM_{it} + \beta_5 PD_{it} + \beta_6 KP_{it} + e_{it}$$

Dimana:

PC	= Kejahatan Properti
GR	= Ketimpangan Pendapatan
TP	= Tingkat Pendidikan
TPT	= Tingkat Pengangguran
KM	= Tingkat Kemiskinan
PD	= Kepadatan Penduduk
KP	= Kekuatan Kepolisian
$\beta_1 - \beta_6$	= Koefisien variabel bebas
a	= Konstanta
i	= Provinsi – Provinsi yang ada di Indonesia
t	= tahun (2019–2023)
e	= Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pemilihan Model

Alat Uji	Chi-Square Statistic	Probabilitas	Keputusan
Chow	161.742906	0.0000	Fixed Effect Model
Hausman	25.638708	0.0003	Fixed Effect Model

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 13, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik yang tercantum pada Tabel 1, diketahui bahwa nilai probabilitas dari uji Chow adalah 0,0000, yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0003, yang juga berada di bawah batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hasil tersebut semakin memperkuat bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.019619	1.847411	3.258407	0.0014
GR	4.266589	1.484184	2.874704	0.0047
TP	0.260267	0.139795	1.861772	0.0649
TPT	-0.110574	0.027402	-4.035272	0.0001
KM	0.007606	0.048177	0.157883	0.8748
KP	0.001138	0.000702	1.620712	0.1075
PD	0.007736	0.001613	4.795108	0.0000
R-squared			0.883823	
F-statistic			25.35859	
Prob(F-statistic)			0.00000	

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 13, 2025

Berdasarkan hasil regresi estimasi Fixed Effect Model pada tabel di atas maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut

$$\text{LOGPC} = 6.0196 + 4.2665 \cdot \text{GR} + 0.2602 \cdot \text{TP} - 0.1105 \cdot \text{TPT} + 0.0076 \cdot \text{KM} + 0.0011 \cdot \text{KP} + 0.0077 \cdot \text{PD}$$

Hasil estimasi model regresi menunjukkan konstanta sebesar 6,0196, yang merefleksikan hubungan positif dan bermakna antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan asumsi bahwa ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, serta kekuatan kepolisian berada pada kondisi konstan, tingkat kejahatan properti diperkirakan mencapai 6,0196 persen. Nilai probabilitas F-statistic adalah 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 mengindikasikan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sehingga model regresi dapat dianggap layak. Selain itu, koefisien determinasi R^2 adalah 0,88 mengimplikasikan bahwa sekitar 88% variasi tingkat kejahatan properti di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model, sedangkan sisanya sekitar 12% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kejahatan Properti di Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa semakin besar kesenjangan pendapatan antar individu di suatu daerah, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya tindak kejahatan properti. Sebaliknya, ketika distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih seimbang, tingkat kejahatan properti cenderung mengalami penurunan. Secara teoritis hasil ini sejalan dengan pandangan Becker (1974), yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan dapat menciptakan kesenjangan sosial antara kelompok berpendapatan rendah dan kelompok dengan kekayaan lebih tinggi. Ketimpangan tersebut mendorong individu dengan pendapatan rendah untuk memandang aktivitas kriminal sebagai alternatif dalam memperoleh sumber daya ekonomi. Kondisi demikian meningkatkan potensi terjadinya kejahatan, terutama di wilayah yang memperlihatkan jurang ketimpangan yang semakin lebar.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kejahatan Properti di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi regresi, penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Koefisien regresi sebesar 1,8617 dengan nilai signifikansi $0,06 < 0,10$ menunjukkan bahwa variabel ini signifikan pada tingkat kepercayaan 10%, namun tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5% karena nilai probabilitasnya melebihi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat cenderung beriringan dengan meningkatnya angka kejahatan properti di Indonesia.

Penelitian Murialti (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dapat mendorong tingginya angka kriminalitas di Provinsi Riau. Temuan tersebut tampak berlawanan dengan pandangan umum yang berasumsi bahwa pendidikan berperan dalam menekan angka kejahatan melalui peningkatan kesadaran hukum, moralitas, dan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak. Namun, dalam konteks tertentu, peningkatan pendidikan tidak selalu sejalan dengan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja berpendidikan dan peluang kerja yang tersedia dapat menimbulkan kekecewaan sosial serta frustrasi ekonomi, yang pada akhirnya mendorong sebagian individu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk melakukan tindak kriminal secara lebih sistematis, termasuk kejahatan intelektual maupun kejahatan berbasis teknologi.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kejahatan Properti di Indonesia

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Koefisien regresi yang diperoleh sebesar -4,0352 dengan tingkat signifikansi $< 0,05$, yang berarti peningkatan tingkat pengangguran akan diikuti dengan penurunan kejahatan properti di Indonesia.

Menurut Nindri dan Devia (2023), variabel pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindak kejahatan di Indonesia, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pengangguran, maka kecenderungan terjadinya tindak kriminal juga menurun. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah berupaya menekan angka pengangguran dengan menyediakan berbagai program pelatihan kerja secara gratis melalui lembaga pelatihan resmi yang bersertifikat. Kepemilikan sertifikat ini meningkatkan daya saing dan peluang individu untuk memasuki dunia kerja, karena perusahaan dapat menilai rekam jejak serta kompetensi calon tenaga kerja secara objektif. Dengan meningkatnya akses terhadap pekerjaan yang layak, masyarakat memiliki sumber penghasilan yang stabil sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal guna memenuhi kebutuhan hidup menjadi lebih kecil.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Kejahatan Properti di Indonesia

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,1578 dengan tingkat signifikansi $> 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan cenderung diikuti oleh peningkatan kejahatan properti di Indonesia. Wicaksono (2023), kemiskinan memiliki pengaruh terhadap munculnya tindakan kejahatan. Individu yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sering kali terdorong untuk melakukan berbagai cara, termasuk tindakan yang melanggar hukum. Rasa iri yang muncul di kalangan masyarakat berpendapatan rendah terhadap kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dapat memicu motivasi untuk melakukan kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, kondisi kemiskinan di Indonesia

dipandang sebagai bentuk kekerasan struktural yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk munculnya korban akibat ketimpangan sosial tersebut.

Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kejahatan Properti di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk dalam suatu wilayah cenderung diikuti oleh kenaikan kasus kejahatan properti, sedangkan penurunan kepadatan penduduk umumnya diiringi oleh penurunan aktivitas kejahatan tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa daerah dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi memiliki potensi risiko kriminalitas yang lebih besar, yang kemungkinan disebabkan oleh intensitas interaksi sosial yang tinggi serta meningkatnya persaingan dalam memperoleh sumber daya ekonomi.

Pengaruh Kekuatan Kepolisian Terhadap Kejahatan Properti di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan kepolisian memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia. Temuan ini mengandung makna bahwa peningkatan kekuatan kepolisian cenderung diikuti oleh kenaikan angka kejahatan properti, sedangkan penurunan kekuatan kepolisian juga beriringan dengan menurunnya tingkat kejahatan properti. Namun demikian, karena pengaruhnya tidak signifikan, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan adanya keterkaitan yang konsisten antara kedua variabel tersebut. Secara teori penelitian ini tidak sejalan semestinya Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan aparat kepolisian belum optimal dalam menekan angka kejahatan properti. Jumlah aparat yang banyak belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum, sebab faktor seperti kualitas penyelidikan, tingkat kepercayaan masyarakat, serta sinergi antara masyarakat dan kepolisian juga turut berpengaruh. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas aparat serta peningkatan kolaborasi masyarakat agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera dan pencegahan yang lebih efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan model terbaik, yaitu *Fixed Effect Model*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia.
- (2) Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia.
- (3) Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia.
- (4) Tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia.
- (5) Kekuatan kepolisian berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia.
- (6) Kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia.

Secara simultan, hasil pengujian signifikansi melalui uji F bahwa variabel ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, dan kekuatan kepolisian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia, dengan nilai F-statistik sebesar 0,000. Selain itu, nilai

koefisien determinasi R^2 sebesar 0,88% menggambarkan bahwa variabel-variabel independen tersebut memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi tingkat kejahatan properti di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Becker, G. S. (1974). *Crime and Punishment : An Economic Approach: Vol. I*.
- Fachrurrozi kamal, Fahmiwati, Hakim Lukmanul, Aswadi, L. (2021). PENGARUH KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA DI TAHUN 2019. *Jurnal Real Riset, Volume 3*.
- Hardianto, F. N. (2009). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas*. 13.
- Imran, M., Hosen, M., & Chowdhury, M. A. F. (2018). Does poverty lead to crime? Evidence from the United States of America. *International Journal of Social Economics*, 45(10), 1424–1438. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0167>
- Murialti, N., & Hadi, M. F. (2023). Analisis Tingkat Kriminalitas Di Propinsi Dengan Pendekatan Data Panel. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 56–64. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4874>
- Nindri, S. Y. M., & Devia S.S, V. (2023). Hubungan Variabel Makroekonomi dan Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *NUANSA : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 20(2), 163–180.
- Nurhaz Winda, S. U. S. (2022). *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tindakan Kriminalitas Di Provinsi-Provinsi Di Indonesia*. 3, 65–72.
- Tamin, B. Y. (2018). *Tingkat Kriminalitas di Indonesia dan Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2005). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1*.
- Wicaksono, A. S., & Suharto. (2023). Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 50–57. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art6>